

LAPORAN KINERJA

20
25

**KPKNL BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan limpahan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan laporan kinerja organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung tahun 2025. Laporan kinerja organisasi ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Bandung selama tahun 2025. Laporan Kinerja Organisasi KPKNL Bandung juga menggambarkan hambatan dan tantangan yang dihadapi di tahun 2025 serta langkah- langkah yang telah dilaksanakan di tahun 2025. Tahun 2025 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bandung sebesar 112.1%.

Laporan kinerja organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyusunan LKj di lingkungan Kemenkeu Tahun 2025, yaitu pada level Kemenkeu-Wide, Unit Pemilik Kinerja (UPK)-One, UPK-Two dan UPKThree.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Organisasi KPKNL Bandung Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi pedoman penyusunan target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan peluang dan tantangan yang ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung.

Bandung, 13 Februari 2026
Plt. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Andy Pardede





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPKNL Bandung	3
B. Sumber Daya Manusia	4
C. Sarana dan Prasarana	6
D. Wilayah Kerja	6
E. Peran Strategis	7
F. Permasalahan Utama	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Peta Strategi KPKNL Bandung	16
B. Perjanjian Kinerja 2025	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi 2025	23
B. Realisasi Anggaran	38
C. Prestasi dan Penghargaan	40
BAB IV PENUTUP	41



BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPKNL Bandung

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.

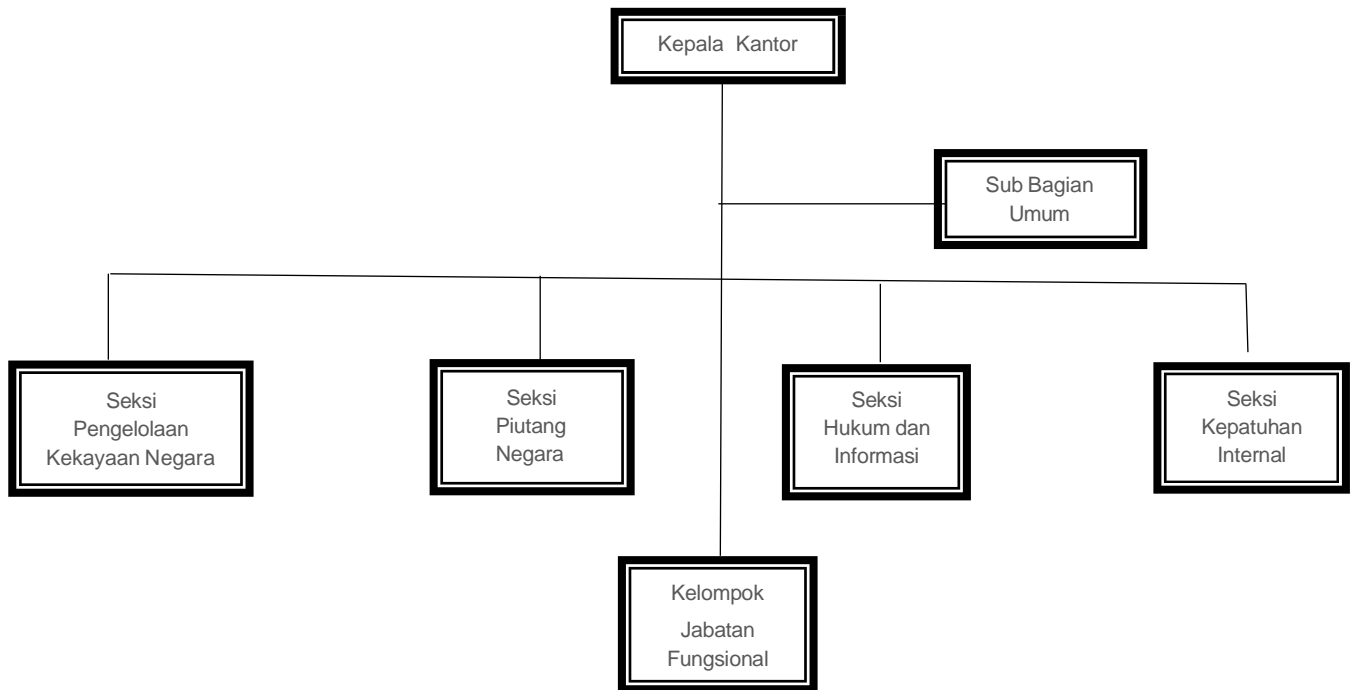
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bandung mempunyai tugas mengadakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan piutang pengurusan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, pengalihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL.



Struktur Organisasi KPKNL Bandung dapat terlihat dalam bagan di bawah ini



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, disebutkan bahwa susunan organisasi KPKNL terdiri dari :

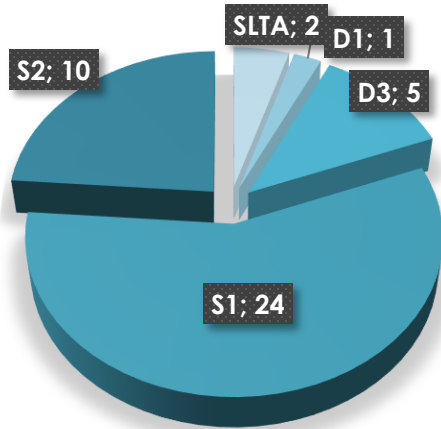
1. Sub Bagian Umum;
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
3. Seksi Piutang Negara;
4. Seksi Hukum dan Informasi;
5. Seksi Kepatuhan Internal;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Sumber Daya Manusia

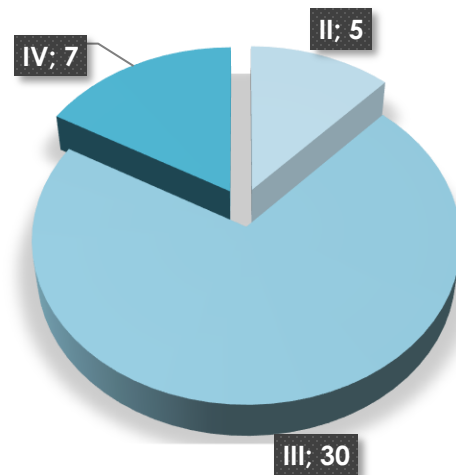


Sumber daya manusia di lingkungan KPKNL Bandung per tanggal 31 Desember 2025 berjumlah 42 pegawai dengan komposisi berdasarkan pendidikan, golongan, Jabatan Fungsional, umum dan gender sebagai berikut:

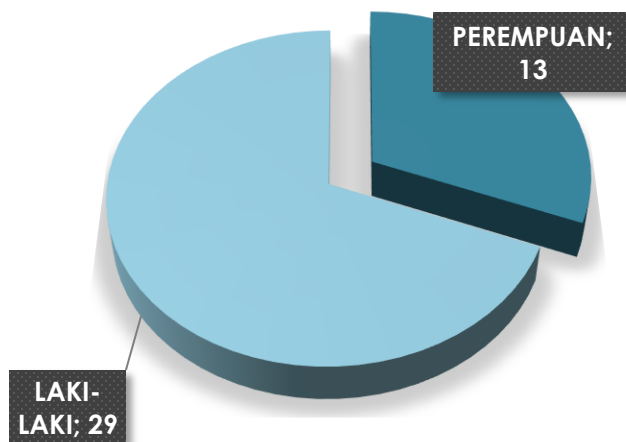
1. Berdasarkan tingkat Pendidikan



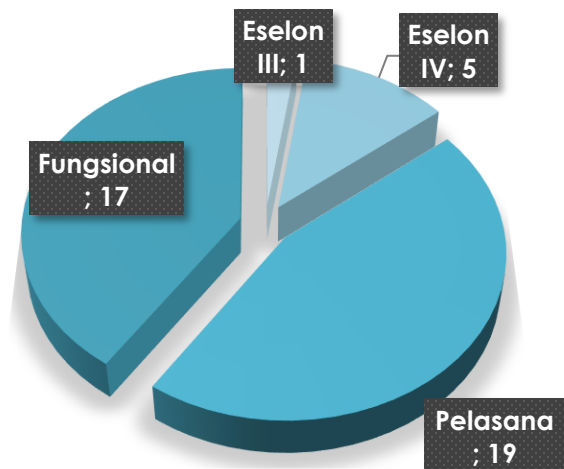
2. Golongan



3. Berdasarkan Jenis Kelamin



4. Berdasarkan Jabatan





C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki oleh KPKNL Bandung merupakan modal penting dalam mendukung tercapainya visi dan misi instansi. Adapun sarana dan prasarana yang secara fisik menunjang pelaksanaan tugas operasional KPKNL Bandung dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Penunjang Kegiatan Administratif

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan administratif terdiri dari perangkat komputer, ruang fungsional, dan ruang penyimpanan berkas. Perangkat komputer yang ada cukup memadai dan dapat menunjang pengolahan data administratif sehari-hari. Adapun perangkat-perangkat tersebut tersebar di masing-masing ruang kerja pegawai sesuai dengan beban kerja serta kebutuhan masing-masing bagian. Gedung representatif, yang saat ini berada di lantai I dan Lantai II Gedung Keuangan Negara Bandung, dilengkapi dengan Ruang Rapat, Area Pelayanan Terpadu Bersama, Ruang Konsultasi, Ruang laktasi, mushola tamu dan *e-Auction Corner* sebanyak 4 ruangan yang digunakan secara optimal dalam memberikan pelayanan terhadap para stakeholders. Selain itu, sarana berupa gudang dan ruang penyimpanan berkas juga cukup memadai dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pengolahan data dan penyimpanan informasi penting yang digunakan dalam dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

2) Penunjang Kegiatan Operasional

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional berupa 5 (lima) unit kendaraan dinas dan perangkat komputer yang digunakan untuk pengolahan data dan penyelesaian produk hukum yang merupakan output KPKNL Bandung. Secara fisik, sarana dan prasarana tersebut memadai dan dapat digunakan secara optimal untuk menunjang kegiatan operasional KPKNL Bandung. Lokasi KPKNL Bandung yang tepat berada di pusat Kota Bandung, secara tidak langsung mendukung kinerja operasional dan administratif dalam menunjukkan kewibawaan KPKNL Bandung selaku Manajer Aset Negara.

D. Wilayah Kerja

Sebagaimana tugas dan fungsinya, KPKNL Bandung selaku unit Eselon III dibawah Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat memberikan pelayanan bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan



piutang negara, pelayanan lelang, dan pelayanan penilaian barang milik negara kepada para *stakeholder* yang berada di wilayah kerja KPKNL Bandung, yang meliputi :

1. Kota Bandung
2. Kabupaten Bandung
3. Kabupaten Bandung Barat
4. Kota Cimahi
5. Kabupaten Sumedang

Wilayah Kerja **KPKNL BANDUNG**



E. Peran Strategis

KPKNL Bandung selaku instansi vertikal DJKN memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara;



Perjalanan panjang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam mengelola aset negara telah melalui berbagai fase transformasi dan perkembangan yang signifikan. Seiring dengan dinamika lingkungan strategis, kompleksitas pengelolaan aset negara terus meningkat, baik dari sisi regulasi, tuntutan akuntabilitas publik, maupun kebutuhan optimalisasi pemanfaatan aset. Kondisi tersebut menuntut DJKN untuk tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan pengamanan aset, tetapi juga mampu menjawab tantangan perubahan yang berlangsung cepat di era modern.

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan negara, DJKN mengemban visi “Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Visi tersebut menegaskan peran strategis DJKN sebagai asset manager pemerintah yang tidak hanya menjaga nilai aset, tetapi juga mendorong optimalisasi pemanfaatannya guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menjawab tantangan dan perkembangan pengelolaan kekayaan negara ke depan, DJKN telah menetapkan arah kebijakan strategis melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019 tentang Roadmap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2019–2028 (Roadmap to a Distinguished Asset Manager). Melalui roadmap tersebut, DJKN mereformulasi visi dan menetapkan arah baru pengelolaan kekayaan negara, yaitu “Menjadi pengelola kekayaan negara yang produktif secara optimal untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Arah baru ini menekankan pentingnya pengelolaan aset negara yang tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga produktif dan berorientasi pada hasil.

Untuk mewujudkan visi dan arah strategis tersebut, diperlukan sinergi dan komitmen seluruh komponen organisasi DJKN, baik di tingkat pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Setiap unit kerja dituntut untuk menyusun dan melaksanakan strategi yang selaras, serta mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Dalam konteks tersebut, pada tahun 2025, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Bandung mengarahkan seluruh sumber daya dan pelaksanaan kegiatannya untuk tetap fokus



pada peran strategis dalam mendukung terwujudnya DJKN sebagai a *Distinguished Asset Manager*. Fokus tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pengelolaan aset negara, optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan aset. Dengan demikian, pengelolaan kekayaan negara tidak hanya berfungsi sebagai sarana penunjang operasional pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung keberlanjutan fiskal dan pembangunan nasional.

2. Penilaian;

Penilaian pada KPKNL Bandung memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya dalam penyediaan layanan penilaian yang berkualitas, objektif, dan akuntabel. Layanan penilaian tersebut meliputi penilaian Barang Milik Negara (BMN), penilaian aset untuk keperluan pemanfaatan dan pemindahtanganan, serta penilaian jaminan piutang negara dalam rangka pelaksanaan lelang. Peran ini sangat penting sebagai dasar penetapan nilai wajar yang digunakan dalam pengambilan keputusan pengelolaan kekayaan negara dan penyelesaian piutang negara.

Peran strategis Satuan Kerja Penilaian di KPKNL Bandung juga diwujudkan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap hasil laporan penilaian. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan penilaian telah disusun sesuai dengan standar penilaian yang berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, hasil penilaian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Selain itu, pada tahun 2025 KPKNL Bandung terus berperan aktif dalam mendukung pengelolaan data dan sistem informasi penilaian yang andal dan terintegrasi. Kegiatan penilaian BMN, termasuk hasil Revaluasi Aset BMN yang telah dilaksanakan secara nasional, dimanfaatkan sebagai dasar pemutakhiran nilai aset negara agar mencerminkan kondisi dan nilai wajar terkini. Peran strategis ini penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara, yang meliputi tanah, bangunan gedung, jalan, jembatan, dan aset tetap lainnya, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pelaksanaan kegiatan penilaian pada tahun 2025 dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



3. Pengurusan Piutang Negara;

Pengurusan piutang negara mempunyai peran strategis untuk melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Peran ini sangat mendukung peran strategis DJKN sebagai revenue center dari sisi biaya administrasi pengurusan piutang negara.

4. Pelayanan Lelang;

Lelang mempunyai peran strategis selaku instansi yang memberikan pelayanan lelang yang berkualitas. Dalam pelayanannya KPKNL Bandung berperan dalam melaksanakan lelang wajib dan lelang sukarela. Ujung terakhir dari Pelayanan Lelang adalah Revenue Center. Melalui Lelang diperoleh hasil yang maksimal dari sisi pendapatan negara, sesuai peran strategis seksi pelayanan lelang yaitu mendapatkan pendapatan negara yang optimal, berupa bea lelang yang disetor ke kas negara. "Sales mean Auction" pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana cara jual beli lainnya. KPKNL Bandung juga sangat berperan sebagai akselerator agar lelang menjadi salah satu instrumen dalam menggerakkan ekonomi nasional. Bahwa lelang adalah pelaksanaan jual beli yang menguntungkan, sehingga berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat baik secara langsung maupun dampak tidak langsung dari sisi "Law Enforcement".

F. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama yang menghambat pencapaian kinerja KPKNL Bandung tahun ini adalah:

1. Bidang Kekayaan Negara

Dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, masih terdapat sejumlah permasalahan utama yang memengaruhi efektivitas dan optimalisasi pengelolaan aset negara. Permasalahan tersebut muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas aset, dinamika regulasi, serta tuntutan akuntabilitas dan kinerja yang semakin tinggi.

Karakteristik wilayah kerja KPKNL Bandung yang mencakup area dengan nilai ekonomi tinggi, tingkat urbanisasi yang pesat, serta keberagaman jenis dan sebaran Barang Milik Negara (BMN)



menghadirkan tantangan tersendiri dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang produktif dan berorientasi pada nilai tambah.

Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya pemanfaatan kekayaan negara, khususnya Barang Milik Negara (BMN) yang belum dimanfaatkan secara produktif. Masih terdapat aset negara yang berstatus idle atau belum dimanfaatkan sesuai dengan potensi terbaiknya, sehingga belum memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan negara maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan perencanaan pemanfaatan, kendala legalitas, serta belum selarasnya kebutuhan pengguna barang dengan potensi ekonomi aset yang dimiliki.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan kualitas data dan informasi kekayaan negara. Ketepatan, kelengkapan, dan keandalan data aset masih memerlukan penguatan, baik dari sisi pencatatan, penilaian, maupun pembaruan data secara berkelanjutan. Data yang belum sepenuhnya akurat dan mutakhir berpotensi menghambat pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam perencanaan pemanfaatan, penilaian kinerja aset, dan optimalisasi penerimaan negara.

Di samping itu, kompleksitas aspek hukum dan administrasi pengelolaan aset juga menjadi tantangan tersendiri. Permasalahan status kepemilikan, sengketa, penguasaan oleh pihak ketiga, serta keterbatasan dokumen legal atas aset negara dapat menghambat proses pengamanan dan pemanfaatan aset. Kondisi tersebut memerlukan koordinasi lintas instansi yang intensif serta penyelesaian yang seringkali memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi kinerja pengelolaan kekayaan negara adalah keterbatasan sumber daya dalam menghadapi tuntutan pengelolaan aset yang semakin kompleks dan berorientasi pada nilai tambah. Di sisi lain, perubahan kebijakan dan kebutuhan adaptasi terhadap sistem dan proses bisnis baru juga menuntut peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur secara berkelanjutan.

Berbagai permasalahan tersebut menjadi tantangan utama yang perlu dikelola secara sistematis dan berkelanjutan agar Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mampu menjalankan peran strategisnya secara optimal. Penanganan permasalahan ini memerlukan penguatan tata kelola,



peningkatan sinergi dengan pemangku kepentingan, serta penerapan strategi pengelolaan aset yang produktif dan berorientasi pada hasil guna mendukung terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang profesional, akuntabel, dan berkontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat.

2. Bidang Lelang

Pencapaian target tahun 2025 dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal antara lain :

- Tingkat terjualnya objek lelang atau produktifitas lelang sangat tergantung pada minat dan daya beli masyarakat;
- Marketabilitas objek lelang (harus menarik, resiko penguasaan objek)
- Kendali suksesnya lelang ada ditangan pemohon lelang dan pasar, sehingga KPKNL sulit memprediksi tingkat kemungkinan objek lelang laku.
- Sebagian besar lelang merupakan lelang eksekusi pasal 6 UUHT serta upaya penyelesaian pinjaman oleh debitur kepada kreditur (pemohon lelang), sehingga lelang lebih berfungsi sebagai *law enforcement* dan dikenal dengan banyak permasalahan.
- Banyaknya gugatan perkara terkait lelang yang masih aktif di KPKNL Bandung. Hal ini sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk membeli objek lelang.
- Situasi perekonomian secara global dan regional secara tidak langsung bidang ekonomi dan keuangan di dalam negeri. Lelang sebagai salah satu sub sektor keuangan dan bisnis ikut pula terdampak, dengan menurunnya daya beli. Hal ini makin menghambat KPKNL Bandung dalam pencapaian target lelang.

3. Bidang Penilaian

Permasalahan utama yang dihadapi pada Bidang Penilaian KPKNL Bandung pada tahun 2025 antara lain masih adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya Penilai Pemerintah. Jumlah Penilai Pemerintah secara umum telah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas penilaian, namun tingginya beban kerja dan kompleksitas penugasan penilaian berpotensi memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan penilaian, khususnya dalam menjaga ketepatan waktu dan kualitas hasil penilaian.



Selain itu, perkembangan jenis dan karakteristik objek penilaian yang semakin beragam, termasuk penilaian BMN dengan karakteristik khusus, serta aset yang terkait dengan kegiatan bisnis, menuntut adanya penguatan regulasi, pedoman teknis, serta standardisasi penilaian yang berkelanjutan. Dinamika tersebut memerlukan penyesuaian metodologi dan pendekatan penilaian agar hasil penilaian tetap andal, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kekayaan negara.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan kompetensi dan pengalaman Penilai Pemerintah dalam menangani jenis penilaian tertentu, khususnya penilaian bisnis dan sumber daya alam. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi berkelanjutan, serta peningkatan jam terbang penilai. Di sisi lain, tingginya permohonan penilaian yang masuk belum sepenuhnya sebanding dengan kapasitas penilai yang tersedia, sehingga diperlukan pengelolaan prioritas dan perencanaan kegiatan penilaian yang lebih efektif dan efisien.

4. Bidang Piutang Negara

Seperti dengan bidang yang lain, bidang piutang negara juga mengalami beberapa kendala yaitu:

1. Keberadaan penanggung hutang, penjamin hutang, atau ahli waris sulit ditelusuri, mengingat dokumen pada BKPN tidak mempunyai informasi yang memadai untuk melakukan penelusuran.
2. Rendahnya kemampuan finansial penanggung hutang, penjamin hutang, atau ahli waris untuk melakukan pembayaran kewajiban.
3. Terdapat BKPN yang bernilai besar namun tidak mempunyai barang jaminan sehingga tingkat ketertagihannya rendah.
4. Terdapat BKPN yang tidak dilengkapi dengan dokumen perjanjian yang memadai atau dokumen penyerahan yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan pengurusan piutang negara, sehingga menyulitkan Juru Sita atau Pemeriksa untuk melakukan eksekusi kepada penanggung hutang, penjamin hutang, atau ahli waris.
5. Terdapat BKPN yang penyerahannya berasal dari Pemerintah Daerah, berupa channeling yang disalurkan kepada koperasi atau kelompok masyarakat yang jumlah penanggung



- hutang/penjamin hutangnya lebih dari 3 orang dan tersebar, sehingga menyulitkan penagihan karena membutuhkan alokasi SDM, waktu, dan dana yang banyak.
6. Rendahnya nilai ekonomi dari objek barang jaminan, atau objek barang jaminan tidak marketable.
 7. Koordinasi dan permintaan dokumen terkait kondisi barang jaminan kepada kantor pertanahan memerlukan koordinasi yang intens, sehingga hal ini membutuhkan alokasi waktu yang banyak.
 8. Pelaksanaan perbantuan penyitaan aset pengurusan Piutang Negara membutuhkan waktu, tenaga dan dana dalam berkoordinasi dan pemasangan tanda pada objek sita yang cukup signifikan mengingat tidak semua pihak dapat segera menindaklanjuti permintaan dimaksud.

6. Anggaran

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 memerintahkan efisiensi belanja APBN/APBD 2025 senilai total Rp306,7 triliun untuk dialihkan ke program produktif. Fokus utamanya adalah memangkas belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, honorarium, dan seremonial, guna memperkuat layanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sasaran penghematan Anggaran Pengurangan biaya operasional perkantoran, perjalanan dinas, rapat/seminar, honorarium tim, dan pengadaan sarana yang tidak mendesak. Pada Anggaran Perjalanan Dinas di blokir sebesar 50%. Namun pada triwulan III 2025 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai membuka blokir anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025 untuk mendukung program prioritas pemerintah dan operasional dasar, untuk mempercepat realisasi belanja negara dan memastikan operasional dasar pemerintahan tetap berjalan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan, sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas organisasi sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Berdasarkan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh KPKNL Bandung pada tahun 2025, maka KPKNL Bandung menetapkan indikator kinerja, sebagai sarana mengukur tercapainya sasaran program/kegiatan 2025. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat untuk mengukur keberhasilan instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi atau sesuai mandat yang diemban sehingga setiap langkah yang ditempuh dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat.

Laporan ini merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi DJKN yaitu :

"Mengelola Kekayaan Negara secara profesional dan akuntabel untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat"

Untuk merealisasikan visi tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung mempunyai visi:

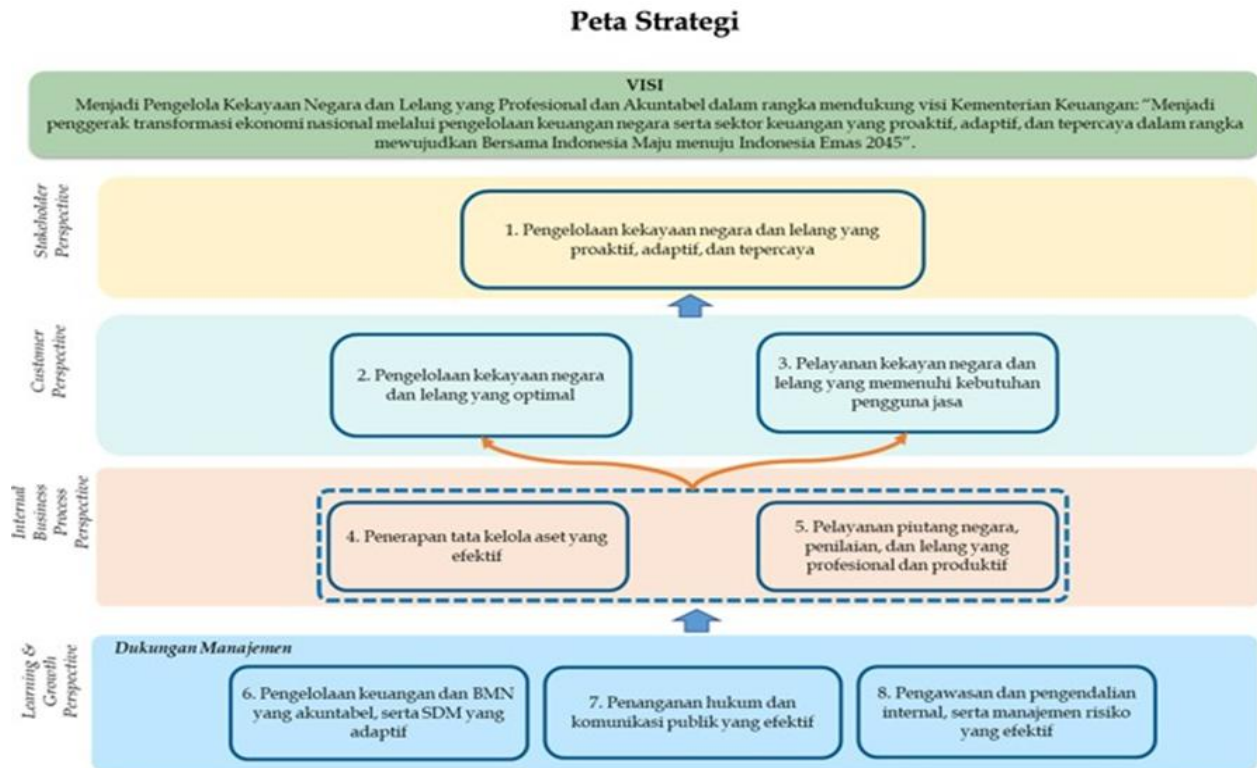
"Mengelola Kekayaan Negara secara profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di Lingkungan KPKNL"

Untuk merealisasikan visi tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara;
2. Mengamankan kekayaan Negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
6. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.



A. Peta Strategi KPKNL Bandung



Peta strategi tersebut disusun untuk menerjemahkan visi misi KPKNL Bandung dalam rangka pencapaian

program. Peta strategi Kemenkeu-Three terdiri dari 4 (empat) perspective yaitu:

1) Stakeholder Perspective

Perspective yang berkaitan dengan stakeholder KPKNL untuk mengetahui kinerja KPKNL Bandung yang paling utama/pokok. Stakeholder perspective terdiri dari 1 (satu) satu sasaran strategis, yaitu Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya.

2) Customer Perspective

Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi. Customer perspective terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dan Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa .



3) Internal Business Process Perspective

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan kepada customer dan stakeholder. Internal process perspective terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Penerapan tata kelola aset yang efektif dan Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif.

4) Learning and growth perspective

Merupakan sumber daya internal KPKNL Bandung yang dimiliki sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan organisasi. Learning and growth perspective terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif, Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif, dan Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.



B. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025

Berdasarkan Sasaran Program/Kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPKNL Bandung tahun 2025, KPKNL Bandung menetapkan indikator kinerja, sebagai sarana mengukur tercapainya sasaran program/kegiatan 2025. Indikator kinerja ini dituangkan dalam Kontrak Kinerja KPKNL Bandung 2025 sebanyak 8 (delapan) sasaran strategis, yang diwujudkan menjadi 20 indikator kinerja utama (IKU). Adapun rincian penjelasan dari masing-masing sasaran strategis termasuk indikator kinerja utama dan realisasi serta target 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya.
Sasaran strategis diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:
 - a) Indeks integritas
 - b) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang
- 2) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
Sasaran strategis diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:
 - a) Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara
 - b) Persentase realisasi pokok lelang
 - c) Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara
- 3) Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa
Sasaran strategis diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu
 - a) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
 - b) Indeks kepuasan pengguna layanan
- 4) Penerapan tata kelola aset yang efektif
Sasaran strategis diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu
 - a) Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan
 - b) Persentase evaluasi kinerja BMN
- 5) Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif
Sasaran strategis diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu
 - a) Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara
 - b) Tingkat kualitas layanan penilaian
 - c) Persentase produktivitas lelang
- 6) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif
Sasaran strategis diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu



- a) Indeks kualitas kinerja anggaran
 - b) Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
 - c) Persentase pengembangan kompetensi pegawai
- 7) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif
Sasaran strategis diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:
- a) Indeks penanganan permasalahan hukum
 - b) Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)
- 8) Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif
Sasaran strategis diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:
- a) Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko
 - b) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
 - c) Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM

Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel perjanjian kinerja tahun 2025, sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp104,8 M)
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp1,1 T)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp9,4 M)



3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80
		8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95,30%
		8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100



Adapun Rincian Target Capaian Kinerja Kepala KPKNL Bandung tahun 2025 adalah:

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100



6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	75,50%	82,50%	82,50%	89,75%	89,75%	95,30%	95,30%
8c-N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 2025

1) Target dan Realisasi Kinerja KPKNL Bandung Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Ikhtisar capaian kinerja organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Unit Organisasi : KPKNL Bandung

Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a CP Indeks integritas	100	105,32	105,32	105,32
		1b CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	113,24%	113,24	113,24
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	106,59%	106,59	106,59
		2b CP Persentase realisasi pokok lelang	100%	83,47%	83,47	83,47
		2c CP Persentase realisasi penurunan nilai	100%	537,96%	537,96	120



		saldo piutang negara				
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	92,47	120,09	120
		3b N Indeks kepuasan pengguna layanan	77	89,11	120,42	120
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a CP Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	123,47%	123,47	120
		4b CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	103,70%	103,70	103,70
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	110,83%	110,83	110,83
		5b CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	98,58%	140,83	120
		5c CP Persentase produktivitas lelang	80%	113,46%	141,82	120
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120	120
		6b N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	125,22	125,22	120



		6c N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	91,60%	114,50	114,50
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100	114,87	114,87	114,87
		7b N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	116,50	145,63	120
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	97,95	122,43	120
		8b N Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95,30%	204,61310%	214,70	120
		8c N Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	84,15	84,15	84,15
	NKO					112,1

Penjelasan atas capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung tahun 2025, sebagai berikut:



1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

a) Indeks integritas

KPKNL Bandung	1 - Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a - CP Indeks integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100	120	120	120	120	105,32	105,32	
Capaian	100%	120%	120%	120%	120%	105,32%	105,32%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	105,32%	105,32%	

Sesuai dengan data hasil SPI dari KPK untuk DJKN tahun 2025 adalah 91,89 atau naik sebesar 4,4 poin dibandingkan tahun 2024 (87,49) dengan hasil SPI Final (setelah diperhitungkan faktor koreksi dan apresiasi) sebesar 94,12 atau mengalami peningkatan 1,68 poin dibandingkan tahun 2024 (92,44). Dengan demikian, capaian IKU Indeks Integritas Organisasi periode triwulan IV tahun 2025 untuk seluruh unit kerja DJKN sebesar 105,32%.

Selain itu telah dilaksanakan realisasi tindak lanjut atas total 14 rencana aksi hasil SPI 2024 yang dilakukan selama tahun 2025 (salah satu variabel penilaian pada faktor apresiasi) telah tuntas (100%) dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan.

b) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

KPKNL Bandung	1 - Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1b - CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	137.25%	126.17%	126.17%	112.99%	112.99%	113.24%	113.24%	
Capaian	120%	120%	120%	112,99%	112,99%	113,24%	113,24%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	112,99%	112,99%	113,24%	113,24%	

Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tercapai 113,24% dari target 100%, terdiri dari :

1) Seksi PKN

Target sebesar Rp 74.438.000.000,00 realisasi Rp 81.616.102.883,00 capaian 109,64%

2) Seksi PN

Target sebesar Rp 43.000.000,00 realisasi Rp 160.251.589,00 capaian 372,68%



3) Pelelang

Target sebesar Rp 30.376.030.000,00 realisasi Rp 36.960.511.773,29, capaian 121,68%

Berikut beberapa Tindakan yang Telah Dilaksanakan:

PN:

- Melaksanakan penelitian lapangan dan penyampaian Surat Paksa
- Secara intens berkoordinasi dengan debitur untuk melakukan angsuran piutang negara
- Lelang eksekusi terhadap barang jaminan yang memiliki potensi besar terjual

PKN:

- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap realisasi PNBPN satker.
- Meningkatkan koordinasi dengan Kanwil, Kementerian/Lembaga pengguna aset, serta pihak penyewa/mitra kerja sama.

Lelang:

- Penguatan sinergi dengan instansi mitra
- Peningkatan sosialisasi dan promosi lelang

2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

a) Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

KPKNL Bandung	2 - Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2a - CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	0	112,82%	112,82%	88,79%	88,79%	106,59%	106,59%	
Capaian	0%	112,82%	112,82%	110,99%	110,99%	106,59%	106,59%	
Nilai Kinerja	0%	112,82%	112,82%	110,99%	110,99%	106,59%	106,59%	

IKU ini merupakan baru dengan manual dan formula perhitungan baru. Capaian IKU ini melibatkan keaktifan Satker dalam tindaklanjutnya. KPKNL Bandung telah melakukan pendataan dan perhitungan optimalisasi terhadap satker dan melakukan koordinasi dengan satker terkait.

b) Persentase realisasi pokok lelang

KPKNL Bandung	2 - Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2b - CP Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	85,71%	65,69%	65,69%	74,11%	74,11%	83,47%	83,47%	
Capaian	85,71%	65,69%	65,69%	74,11%	74,11%	83,47%	83,47%	
Nilai Kinerja	85,71%	65,69%	65,69%	74,11%	74,11%	83,47%	83,47%	



Capaian pokok lelang sebesar 83,47% menunjukkan bahwa capaian realisasi pokok lelang belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi minat lelang maupun proses pelaksanaannya.

Akar masalahnya adalah :

- 1) Penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang oleh pemohon
- 2) Kurangnya objek lelang yang bernilai tinggi
- 3) Fluktuasi minat peserta lelang

Tindakan yang Telah Dilaksanakan:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana lelang dan realisasinya guna mempercepat tindak lanjut;
- 2) Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan pemohon lelang.

c) Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

KPKNL Bandung	2 - Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c - CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	300,10%	125,07%	125,07%	106,67%	106,67%	537,96%	537,96%	
Capaian	120%	120%	120%	106,67%	106,67%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	106,67%	106,67%	120%	120%	

Komposisi terbanyak untuk memenuhi target tahun 2025 adalah penyelesaian melalui PSBDT, yakni terhadap BKPN yang tidak memiliki barang jaminan, dan debitur tidak memiliki kemampuan ekonomi.

Akar Masalah :

- Debitur tidak mempunyai kemampuan membayar.
- Harta Kekayaan Lain (HKL) belum dapat diidentifikasi dengan cepat, jika identitas Debitur tidak memadai.
- Tantangan berikutnya terkait kelancaran koordinasi dengan pihak kantor pertanahan dalam penyajian data HKL Debitur.
- Keterbatasan SDM guna melakukan peningkatan tahap pengurusan piutang negara yang dilakukan secara simultan baik segi administrasi maupun di lapangan.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Melaksanakan penelitian lapangan dan penyampaian Surat Paksa
- Optimalisasi tingkat pengurusan piutang negara secara administrasi



3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

a) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

KPKNL Bandung		3 - Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa						
		3a - CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/ Average
Realisasi	85	92,5	92,5	87,5	87,5	89,11	89,11	
Capaian	114,86%	119,93%	119,93%	119,37%	119,37%	119,63%	119,63%	
Nilai Kinerja	114,86%	119,93%	119,93%	119,37%	119,37%	119,63%	119,63%	

Capaian indeks efektivitas edukasi dan komunikasi yang tinggi menunjukkan bahwa strategi komunikasi dan edukasi yang diterapkan oleh KPKNL Bandung berhasil menjangkau dan memengaruhi pemangku kepentingan secara optimal. Materi, media, serta metode penyampaian informasi dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap tugas dan fungsi DJKN.

Implikasi:

- Meningkatkan kesadaran dan literasi publik terhadap layanan KPKNL, seperti lelang, pengelolaan BMN, dan piutang negara.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder dalam kegiatan layanan dan edukasi.

b) Indeks kepuasan pengguna layanan

KPKNL Bandung		3 - Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa						
		3b - N Indeks kepuasan pengguna layanan						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max/ Average
Realisasi	90,09	91,65	91,65	91,17	91,17	92,47	92,47	
Capaian	117%	118,01%	118,01%	118,37%	118,37%	118,80%	118,80%	
Nilai Kinerja	117%	118,01%	118,01%	118,37%	118,37%	118,80%	118,80%	

Capaian indeks kepuasan pengguna layanan melampaui target, menunjukkan bahwa kualitas layanan KPKNL Bandung mendapat apresiasi tinggi dari pengguna jasa, baik individu, instansi pemerintah, maupun mitra kerja lainnya. Skor kepuasan ini mencerminkan keberhasilan dalam transformasi layanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Implikasi:

- Peningkatan citra positif organisasi di mata masyarakat dan pemangku kepentingan.



- Memberikan motivasi dan dorongan kinerja positif bagi pegawai dalam menjaga kualitas layanan.
- Menunjukkan efektivitas inovasi layanan digital dan tatap muka yang selama ini diimplementasikan.
- Menjadi modal kuat dalam mendorong partisipasi publik dan peningkatan penggunaan layanan KPKNL

Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan, baik secara daring maupun luring, melalui simplifikasi prosedur.
- Menerapkan prinsip layanan prima (service excellence), termasuk keramahan, kejelasan informasi, dan tanggapan cepat.
- Penyebaran kuesioner digital yang lebih luas dan inklusif, menjangkau berbagai kategori pengguna layanan.
- Membangun budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan perbaikan berkelanjutan.

4. Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

a) Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan

KPKNL Bandung	4 - Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a - CP Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	7,36%	44,46%	44,46%	74,43%	74,43%	123,47%	123,47%	
Capaian	120%	111,65%	111,65%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	111,65%	111,65%	120%	120%	120%	120%	

Total target sertifikasi sebanyak 571 bidang tanah, terdapat kendala terkait dengan ketersediaan dana sertifikasi pada BPN.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Rapat koordinasi dengan mengundang kantah untuk menyamakan persepsi
- Mengundang BPN dan satker
- KPKNL Bandung telah memberikan asistensi kepada Satker , dalam hal validasi Bidang Tanah yang bersertifikat belum sesuai ketentuan



b) Persentase Evaluasi Kinerja BMN

KPKNL Bandung	4 - Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b - CP Persentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ Average
Realisasi	11,04%	100,53%	100,53%	88,59%	88,59%	103,70%	103,70%	
Capaian	73,60%	120%	120%	118,12%	118,12%	103,70%	103,70%	
Nilai Kinerja	73,60%	120%	120%	118,12%	118,12%	103,70%	103,70%	

IKU ini merupakan IKU baru dengan manual dan formula perhitungan yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu proses perhitungan capaian melibatkan verifikasi Kanwil dan tindak lanjut dari Satker (di luar kendali). Proses kerja bukan hanya melibatkan tim untuk melakukan survey ke lapangan, namun juga penatausahaan di aplikasi SIMAN v2. Dalam hal ini, baik Kanwil maupun Satker yang disurvei juga harus aktif dalam penatausahaan di SIMAN v2.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

KPKNL Bandung telah melaksanakan survey dan perhitungan evaluasi kinerja (evakin) BMN pada Satker target dan melaksanakan penyelesaian perhitungan Evakin serta mendorong Satker agar menindaklanjuti rekomendasi evakin.

5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

a) Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

KPKNL Bandung	5 - Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a - CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	193,16%	118,82%	118,82%	114,22%	114,22%	110,83%	110,83%	
Capaian	120%	118,82%	118,82%	114,22%	114,22%	110,83%	110,83%	
Nilai Kinerja	120%	118,82%	118,82%	114,22%	114,22%	110,83%	110,83%	

Komposisi terbanyak untuk memenuhi target tahun 2025 adalah penyelesaian melalui PSBDT, yakni terhadap BKPN yang tidak memiliki barang jaminan, dan debitur tidak memiliki kemampuan ekonomi. Masih banyak BKPN yang membutuhkan peningkatan tahap pengurusan baik secara administrasi dan lapangan.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Melaksanakan penelitian lapangan dan penyampaian Surat Paksa
- Optimalisasi tingkat pengurusan piutang negara secara administrasi



b) Tingkat kualitas layanan penilaian

KPKNL Bandung	5 - Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b - CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/ Average
Realisasi	109,25%	94,13%	94,13%	98,29%	98,29%	98,58%	98,58%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Isu Utama:

Pencapaian kinerja layanan penilaian melampaui target menunjukkan peningkatan signifikan dalam kecepatan, ketepatan, dan kualitas penyusunan laporan penilaian.

Implikasi:

- Meningkatnya kepercayaan pengguna layanan terhadap kualitas layanan penilaian KPKNL Bandung.
- Memberikan citra positif terhadap kinerja unit penilaian di mata pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- Mendorong peningkatan volume permintaan layanan penilaian di masa mendatang.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Peningkatan koordinasi dengan satker terkait penyampaian data yang lebih akurat dan lengkap di awal proses.
- Internal review dan kaji ulang laporan oleh tim pengendali mutu untuk memastikan kualitas penilaian.
- Penerapan *early warning system* terhadap permintaan layanan yang berpotensi melebihi kapasitas.

c) Persentase produktivitas lelang

KPKNL Bandung	5 - Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c - CP Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	60,39%	74,37%	74,37%	94,31%	94,31%	113,46%	113,46%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Isu Utama:

Capaian produktivitas lelang yang melebihi target menunjukkan performa yang sangat baik, namun juga memunculkan tantangan dalam mempertahankan kinerja tinggi secara berkelanjutan serta risiko



kelelahan SDM dan potensi penurunan kualitas layanan jika tidak diimbangi dengan kapasitas pendukung yang memadai.

Implikasi:

- Kinerja yang tinggi perlu dijaga
- Peningkatan jumlah lelang harus diimbangi dengan penguatan proses, teknologi, dan manajemen sumber daya.
- Risiko meningkatnya beban kerja tanpa peningkatan efisiensi bisa berdampak pada kepuasan pengguna layanan dan ketepatan waktu pelaksanaan lelang.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder (instansi pengguna layanan lelang) untuk optimalisasi jadwal dan volume lelang.

6 .Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

a) Indeks kualitas kinerja anggaran

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
	Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	109,6	109,6	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	109,60%	109,60%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	109,60%	109,60%	120%	120%	

Kebijakan Pemerintah (Faktor Eksternal): Adanya kebijakan efisiensi belanja yang diberlakukan sejak awal TA 2025 menyebabkan sebagian anggaran diblokir. Blokir baru dibuka kembali melalui surat Menteri Keuangan pada akhir Juli atau awal Agustus 2025. Hal ini menyebabkan realisasi anggaran terhambat pada semester I dan baru bisa dilaksanakan pada semester II. Dengan dibukanya blokir anggaran di pertengahan tahun, pelaksanaan kegiatan menjadi terkonsentrasi pada periode yang lebih sempit (Agustus-Desember). Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan proses administrasi, perencanaan ulang, dan eksekusi kegiatan.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Melakukan percepatan realisasi anggaran
- mengoptimalkan indikator penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian nilai IKPA yang maksimal
- memastikan agar penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 mencapai target minimal 98%



b) Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

KPKNL Bandung	6 - Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b -N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	160	145,71	145,71	135	135	125,22	125,22	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Capaian kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa KPKNL Bandung telah mengelola proses pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien, serta mematuhi prinsip-prinsip pengadaan yang transparan dan akuntabel.

Implikasi:

- Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat terhadap penggunaan produk dalam negeri dan tata kelola yang baik dalam pengadaan.
- Memberikan citra positif terhadap KPKNL Bandung sebagai satuan kerja yang patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Akar Masalah : terdapat beberapa tantangan dan potensi masalah yang perlu diperhatikan, yaitu Ketergantungan pada sistem elektronik berpotensi menimbulkan kendala teknis yang bisa mempengaruhi kualitas pengadaan jika tidak ditangani dengan mitigasi yang baik.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Optimalisasi penggunaan aplikasi pengadaan: Semua paket pengadaan telah dimasukkan dalam SIRUP, dan penggunaan e-Kontrak, e-Tendering, serta e-Purchasing dimaksimalkan sesuai arahan.
- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri: KPKNL Bandung telah memastikan bahwa produk lokal diprioritaskan dalam proses pengadaan sesuai ketentuan perpres dan arahan Kementerian Keuangan

c) Persentase pengembangan kompetensi pegawai

KPKNL Bandung	6 - Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c -N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/ TLK
Realisasi	22,91%	61%	61%	81%	81%	91,60%	91,60%	
Capaian	114,55%	120%	120%	120%	120%	114,50%	114,50%	
Nilai Kinerja	114,55%	120%	120%	120%	120%	114,50%	114,50%	



Realisasi pengembangan kompetensi pegawai yang melampaui target menunjukkan keberhasilan KPKNL Bandung dalam mengelola program peningkatan kapasitas SDM. Hal ini mencerminkan adanya komitmen organisasi terhadap penguatan budaya kerja, peningkatan kapasitas manajerial pejabat administrator, serta terpenuhinya kebutuhan pengembangan teknis dan fungsional seluruh pegawai.

Implikasi Positif:

- Pegawai memiliki kompetensi yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Terbangunnya budaya kerja yang adaptif dan profesional.
- Meningkatnya kesiapan organisasi dalam menghadapi tantangan strategis.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Monitoring dan evaluasi pemenuhan jam pelatihan secara berkala
- Penyusunan dan pelaksanaan rencana pelatihan tahunan berdasarkan peta kompetensi.
- Optimalisasi pemanggilan pegawai untuk mengikuti pelatihan DJKN dan Kemenkeu Corporate University.
- Kegiatan penguatan budaya organisasi melalui coaching dan pembinaan mental berkala bagi pejabat administrator.

7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

a) Indeks penanganan permasalahan hukum

KPKNL Bandung		7 - Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif						
		7a - CP Indeks penanganan permasalahan hukum						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ Average
Realisasi	113,66	110,3	110,3	112,52	112,52	114,87	114,87	
Capaian	113,66%	110,30%	110,30%	112,52%	112,52%	114,87%	114,87%	
Nilai Kinerja	113,66%	110,30%	110,30%	112,52%	112,52%	114,87%	114,87%	

Isu Utama: banyaknya gugatan tahun 2024 yang belum selesai dan gugatan baru sampai dengan Triwulan 3 yang tersebar di beberapa kota/kabupaten yaitu PN Bandung, PN Bale Bandung, PA Bandung, PA Soreang, PN Sumedang, PN Jakarta Pusat, PN Subang, PN Semarang.

Implikasinya: membutuhkan dana perjalanan yang cukup besar untuk menangani sisa perkara 2024 dan perkara 2025.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- Meminta bantuan ke KPKNL yang di luar wilayah kerja KPKNL Bandung
- Penghematan biaya perjalanan dinas



b) Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

KPKNL Bandung	7 - Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7b - N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/ Average
Realisasi	118	117	117	116,67	116,67	116,5	116,5	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

KPKNL Bandung banyak mendapat Register permintaan informasi publik melalui jalur PPID. Pemuktahiran informasi pada website resmi KPKNL Bandung membutuhkan koordinasi dengan pihak penyedia data.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Melakukan pemutakhiran informasi pada website resmi KPKNL Bandung.
- Menanggapi permintaan informasi public yang ditujukan kepada KPKNL Bandung setelah berkoordinasi dengan pihak/seksi penyedia data/informasi

8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

a) Indeks kualitas manajemen kinerja dan risikokinerja kualitas pelaksanaan anggaran

KPKNL Bandung	8 - Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a - N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/ TLK
Realisasi	97,93	98,64	98,64	97,45	97,45	97,95	97,95	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Indeks kualitas manajemen kinerja dan manajemen risiko belum sepenuhnya mencapai level yang optimal berdasarkan hasil penilaian. Hal ini menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan dalam penyelarasan kinerja organisasi dan individu serta dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko. Dampaknya dapat berupa kurang optimalnya pencapaian tujuan strategis, lemahnya akuntabilitas kinerja, serta meningkatnya potensi risiko yang tidak tertangani secara tepat waktu.

Akar Masalah :

- Pemahaman atas siklus manajemen kinerja organisasi dan pegawai belum merata, terutama terkait keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja.
- Dokumentasi dan pelaporan kinerja masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas substansi pencapaian.



- Penyusunan dan pemutakhiran risiko organisasi belum menjadi bagian dari kebiasaan kerja rutin yang berkesinambungan.
- Kurangnya pembinaan dan penguatan kapasitas bagi pengelola kinerja dan pengelola risiko di tingkat operasional.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara tepat waktu
- Penyusunan dokumen manajemen risiko secara tepat waktu

b) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

KPKNL Bandung		8 - Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif						
		8b - N Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti						
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	75.50%	82.50%	82.50%	89.75%	89.75%	95.30%	95.30%	Max/ TLK
Realisasi	0	89%	89%	57,54836	57,54836	204,6131	204,6131	
Capaian	0%	107,88%	107,88%	64,12%	64,12%	120%	120%	
Nilai Kinerja	0%	107,88%	107,88%	64,12%	64,12%	120%	120%	

Isu Utama:

Pada bulan Agustus terjadi peningkatan signifikan jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan. Terdapat penambahan 39 rekomendasi, sehingga total temuan menjadi 57. Namun, hingga akhir bulan September baru 16 temuan yang berhasil diselesaikan dengan status *close verified*. Kondisi ini berdampak pada capaian persentase tindak lanjut yang masih berada di angka 64,12%, lebih rendah dibanding target yang diharapkan.

Implikasi:

- Persentase tindak lanjut yang belum optimal berpotensi menurunkan penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan
- Banyaknya rekomendasi baru telah menambah jumlah rekomendasi yang masih tertunda penyelesaiannya, sehingga memerlukan strategi percepatan tindak lanjut

Akar masalah :

- Penambahan 39 rekomendasi baru menyebabkan beban kerja tindak lanjut semakin besar
- Beberapa rekomendasi memerlukan koordinasi lintas unit, sehingga proses penyelesaian membutuhkan waktu lebih lama

Tindakan yang telah dilaksanakan :

Koordinasi dengan unit teknis yang bertanggung jawab terhadap temuan tersebut untuk penyelesaiannya.



c) Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM

KPKNL Bandung 8 - Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif								
8c - N Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	95	100	100	84,15	84,15	84,15	84,15	
Capaian	95%	100%	100%	84,15%	84,15%	84,15%	84,15%	
Nilai Kinerja	95%	100%	100%	84,15%	84,15%	84,15%	84,15%	

Isu utama dan Implikasi :

Berdasarkan hasil penilaian dokumen oleh TP UE I diperoleh hasil bahwa KPKNL Bandung tidak memenuhi persyaratan untuk diteruskan pada tahapan penilaian TPK.

Akar masalah :

- Kurangnya inovasi layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan.
- Dokumentasi dan eviden pembangunan ZI belum disusun secara sistematis dan sesuai dengan kriteria penilaian dari evaluator eksternal.
- Monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program ZI belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
- Keterlibatan seluruh pegawai dalam pembangunan budaya kerja integritas masih bersifat sektoral dan belum menyeluruh.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

- Pembentukan Tim Pembangunan ZI WBBM yang melibatkan perwakilan dari seluruh seksi dan subbagian.
- Penyusunan rencana kerja dan eviden berdasarkan enam area perubahan: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data realisasi anggaran penyerapan anggaran per 31 Desember 2025, berikut disajikan Tabel Realisasi Anggaran KPKNL Bandung Tahun Anggaran 2025 dan Tabel Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Bandung dari Tahun 2023 s.d. 2025. Sumber data realisasi tersebut diambil dari aplikasi Sistem Aplikasi Satker (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara).



Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja Barang	Rp3.342.752.000,00	Rp2.975.493.115,00	89,01%
Belanja Modal	Rp45.616.000,00	Rp33.300.000,00	73,00%
Belanja Pegawai	0	0	0%
Total	Rp3.388.368.000,00	Rp3.008.793.115,00	88.80 %

Berikut merupakan Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Bandung dari Tahun 2023 s.d. 2025 yang ditunjukkan dalam tabel dibawah dapat dilihat bahwa mulai Tahun 2022 belanja pegawai tidak lagi dilakukan di kantor vertikal melainkan di kantor pusat.

Kegiatan	2023			2024			2025		
	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang	2.763.710.000	2.588.260.867	93,65%	3.316.940.000	2.976.073.710	89,72%	3.342.752.000	2.975.493.115	89,01%
Belanja Modal	96.535.000	95.022.363	98,43%	2.283.473.000	2.257.005.089	98,84%	45.616.000	33.300.000	73,00%
Belanja Pegawai	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
Total	2.683.283.230	2.860.245.000	93,81%	5.575.284.000	5.233.078.799	93,86%	3.388.368.000	3.008.793.115	88.80%



C. Prestasi dan Penghargaan

1) Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak



2) Unit Pengelola Risiko dengan Nilai 100





BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tingkat pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung pada tahun 2025 secara umum dapat dikatakan sangat baik dengan Capaian kinerja keseluruhan (Nilai Kinerja Organisasi/NKO) sebesar 112,1%.

Capaian kinerja tahun 2025 diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun 2026 dengan melakukan mitigasi risiko dan langkah-langkah serta inovasi yang diperlukan dalam meningkatkan kinerja KPKNL Bandung untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh pengguna jasa dengan tetap mengutamakan integritas.

Sebagai penutup, Laporan Kinerja Tahun 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, diharapkan dapat memberikan informasi yang baik untuk seluruh pengguna jasa sebagai kontribusi/pertanggungjawaban dalam pelaksanaan rencana kerja/rencana strategis Kementerian Keuangan serta diharapkan mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode yang akan datang.